

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Al-Qur'an

A.R Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011).

Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, , *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Maa Laa Yasa'u al-Taajir Jahlahu)*, (Jakarta : Darul Haq, 2004).

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta, UII Press, 2009).

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara, 2006)

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Edisi bahasa Indonesia, (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2000).

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, (Semarang: CV. Ananta, 1994).

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

- Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996).
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Banyu Publishing, 2004).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988).
- Muchlis Patahna, *Problematika Notaris*, (Jakarta: Rajawali, 2006).
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003).
- Philiphus M. Hardjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Purnama T. Sianturi, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bogor: CV. Mandar Maju, 2008).
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016).
- Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Edisi Kedua, (Bandung: PT. Eresco, 2009).
- Simorangkir, J.C.T., dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-3, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990).

Yos Johan Utama, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara*, Bahan Diskusi untuk Forum Diskusi, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.06/ 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal

Sari Pratama Putriningsih, R. Benny Riyanto, Marjo, 2016, Prosedur Penjualan Lelang atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro, *Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016*, diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/.../11737>

D. Sumber Internet

<http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>

Ana Selvia Khoerunisa dan EEF Saefullah, Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam, diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article>.